

**PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN *FISCAL STRESS*
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018-2022**



Skripsi Oleh :
DESY RISMAULI
01021181924188
EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP BELANJA DAERAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2022

Disusun Oleh :


Nama : Desy Rismauli
NIM : 01021181924188
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 07 September 2023


Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si.
NIP. 196805181993031003

LE

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP BELANJA DAERAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2022

Disusun Oleh :

Nama : Desy Rismauli
NIM : 01021181924188
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 17 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si.
NIP. 196805181993031003

Dosen Penguji



Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
NIP. 197403252009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
22-1-2024

JUR. EK. PEMBANGUNAN
FACULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Desy Rismauli
NIM : 01021181924188
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Pembimbing :

Nama Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si.
Tanggal Ujian : 20 Desember 2023

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 17 Januari 2024
Pembuat Pernyataan

ASLI
JUR EK PEMBANGUNAN 22-1-2024
FAKULTAS EKONOMI UNERI



Desy Rismauli
NIM. 01021181924188

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat dan *Fiscal Stress* Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022” sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, *Tax Effort*, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Akan tetapi, berkat dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Indralaya, 17 Januari 2024

Penulis



Desy Rismauli

NIM. 01021181924188

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, penyertaan, kesehatan, rezeki, kasih karunia yang tiada hentinya mengalir, serta memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staff jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembelajaran, pengetahuan, wawasan yang sangat bermanfaat dan berharga selama proses perkuliahan
6. Kedua orang tua tercinta Mama Sonti Sirait dan Bapak J. M. Sitanggang, kedua saudaraku Samuel Sitanggang dan Kasih Sitanggang, serta teman terbaikku Rani Apriyanti yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 17 Januari 2024

Penulis



Desy Rismauli

NIM. 01021181924188

ABSTRAK

PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2022

Oleh :

Desy Rismauli; Azwardi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat dan *Fiscal Stress* terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data panel dari tahun 2018-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK, *Fiscal Stress*, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.

Kata Kunci: *DAU, DAK, DBH, Fiscal Stress, PDRB, Belanja Daerah*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Ketua



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CENTRAL GOVERNMENT TRANSFER AND FISCAL STRESS ON REGIONAL EXPENDITURE REGENCIAS/MUNICIPALITIES IN SOUTH SUMATERA YEAR 2018-2022

By:
Desy Rismauli; Azwardi

This study aims to analyze the Effect of Central Government Transfer and Fiscal Stress on Regional Expenditure Regencies/Municipalities in South Sumatera Year 2018-2022. The data used in this research is secondary data in the form of panel data from 2012-2021, sourced from the Central Agency on Statistics and Directorate General of Fiscal Balance. In this study using a quantitative approach to panel data regression analysis. The results of this study indicate that the variable DAU, DAK, Fiscal Stress, and PDRB has a significant positive effect on Regional Expenditure Regencies/Municipalities in South Sumatera Year 2018-2022.

Keywords: *DAU, DAK, DBH, Fiscal Stress, PDRB, Regional Expenditure*

Aknowledge by,

Head of Development Economics Department

Chairman



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si
NIP.196805181993031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	Desy Rismauli
	NIM	01021181924188
	Tempat, Tanggal Lahir	Jambi, 05 Desember 2000
	Alamat	Komp. Sangkuriang Blok J No 3213
	Handphone	085609480879
Agama	Kristen Protestan	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi Badan	160 cm	
Berat Badan	51 kg	
Email	desyrismauli5@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2007-2013	SD Negeri 113 Palembang	
2013-2016	SMP Negeri 53 Palembang	
2016-2019	SMA Negeri 16 Palembang	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2019-2020	Anggota KEIMI (Komunitas Edukasi Ilmiah Ekonomi)	
2020-2021	Anggota IMEPA (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan)	
2021-2022	Sekretaris Cabang GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang Palembang M.B. 2021-2022	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Pengeluaran Pemerintah	7
2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	10
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	12
2.1.4. Transfer Pemerintah	13
2.1.5. Dana Perimbangan	15
2.1.6. Fiscal Stress (Tekanan Fiskal)	17
2.1.7. Belanja Daerah.....	18
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pikir	27
2.4. Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2. Jenis Data dan Sumber Data	28
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4. Teknik Analisis Data.....	29
3.4.1. Teknik Analisis Kualitatif.....	29
3.4.2. Teknik Analisis Kuantitatif.....	29
3.4.3. Regresi Data Panel	30
3.4.4. Uji Kesesuaian Model.....	30
3.4.5. Metode Pemilihan Kesesuaian Model.....	32
3.4.6. Uji Asumsi Klasik.....	33
3.4.7. Uji Hipotesis	35
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 38
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	38
4.1.2. Perkembangan DAU Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan	40
4.1.3. Perkembangan DAK Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan	41
4.1.4. Perkembangan DBH Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan.....	43
4.1.5. Perkembangan Fiscal Stress Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan.....	44
4.1.6. Pertumbuhan PDRB Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan	46
4.1.7. Belanja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Prov. Sumatera Selatan.....	48
4.2. Hasil Penelitian	49
4.2.1. Estimasi Model Data Panel.....	49
4.2.2. Pemilihan Model Data Panel.....	51
4.2.3. Random Effect Model.....	53
4.2.4. Uji Asumsi Klasik.....	54
4.2.5. Uji Hipotesis	57
4.2.6. Koefisien Determinasi.....	58
4.3. Pembahasan.....	58
 BAB V PENUTUP.....	 64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA.....	 66

LAMPIRAN..... 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah).....	4
Tabel 2 Realisasi Belanja APBD Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah).....	5
Tabel 3 Ibukota dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	39
Tabel 4 Perkembangan DAU Kab/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)	41
Tabel 5 Perkembangan DAK Kab/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)	42
Tabel 6 Perkembangan DBH Kab/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)	44
Tabel 7 Kondisi Fiscal Stress Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (dalam persen).....	46
Tabel 8 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Prov. Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (dalam persen)	47
Tabel 9 Belanja Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022	49
Tabel 10 Hasil Common Effect Model	50
Tabel 11 Hasil Fixed Effect Model	50
Tabel 12 Hasil Random Effect Model	51
Tabel 13 Hasil Uji Chow	51
Tabel 14 Hasil Uji Hausman	52
Tabel 15 Hasil Uji LM.....	53
Tabel 16 Hasil Random Effect Model	54
Tabel 17 Hasil Uji Multikoleniaritas.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Sumatera Selatan.....	38
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas	54
Gambar 3 Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas.....	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual.....	27
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	69
Lampiran 2 Fixed Effect Model.....	71
Lampiran 3 Common Effect Model	72
Lampiran 4 Random Effect Model	73
Lampiran 5 Uji Chow	74
Lampiran 6 Uji Hausman.....	75
Lampiran 7 Uji Lagrange Multiplier.....	76
Lampiran 8 Uji Korelasi	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintahan sendiri, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan untuk daerah guna memenuhi keperluan penduduk dan mengembangkan wilayahnya sesuai target yakni pembangunan nasional. Tanggungjawab yang diterima menunjukkan perlunya daerah memiliki visi yang luas, pengembangan SDM yang kompetitif secara berkualitas & kuantitas, serta kemampuan mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Otonomi daerah yang lebih besar diikuti oleh perimbangan keuangan. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa perimbangan perekonomian pusat dan daerah sebagai sistem distribusi yang efisien, demokratis, proporsional, transparan, dan adil. Saragih (2003) mengemukakan bahwasana perimbangan fiskal yakni salah satu bentuk desentralisasi fiskal, proses dimana pemerintah pusat mengalokasikan anggarannya kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah agar dapat berfungsi di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kebutuhan fiskal daerah yang disediakan oleh pemerintah pusat berupa dana transfer yang berperan sebagai pemerataan dan penyeimbang keuangan antar wilayah.

Bastian (2006) mengemukakan bahwasanya pembayaran transfer pemerintah pusat adalah sistem fiskal, termasuk alokasi anggaran dan keadilan dalam arah tanggung jawab dan kekuasaan pengelolaan fiskal antar daerah. Adanya kemungkinan sumber daya dan masalah yang beragam dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, dan daerah sering kali merespons transfer secara berbeda, harapannya transfer bisa menutup kesenjangan fiskal antar wilayah sehingga bisa mencukupi kebutuhan keuangan yang sebelumnya tidak terpenuhi secara lokal. Menurut Musgrave (1959), salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi. Ketika pemerintah menerapkan desentralisasi, pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan secara relatif merata. APBN yakni dana pembayaran transfer dari pemerintah pusat yang didistribusikan ke setiap wilayah

guna mencukupi kebutuhan setiap kabupaten dalam meningkatkan pelayanan publik. Adi (2007) berpendapat bahwasanya guna mencapai kemandirian suatu daerah diperlukan partisipasi dari masyarakat di wilayah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah lebih mempertimbangkan konektivitas masyarakat lokal dengan berpegang pada prinsip alokasi sumber daya yang efektif juga efisien dengan asumsi bahwa pemda lebih terinformasi dan lebih responsif daripada pemerintah pusat. Keunggulan dari fiskal itu sendiri adalah belanja daerah yang berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Putusan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, belanja daerah memiliki prioritas utama yakni menjaga dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Shamsub dan Akoto (2004) berpendapat yakni kriteria daerah berpenghasilan rendah mendominasi maksimalnya potensi pajak, sementara tingginya pengeluaran agregat akan dikaitkan pada tekanan fiskal yang relatif tinggi.

Stone (2015) mengemukakan bahwa dengan desentralisasi seharusnya posisi fiskal pemerintah daerah semakin kuat dalam menyediakan *public goods* lokal sesuai dengan preferensi dari masyarakat, tetapi pada kenyataannya posisi fiskal pemerintah daerah justru melemah. Chung & Williams (2020) mengemukakan bahwasanya wilayah dengan tekanan keuangan yang lebih rendah cenderung dapat memperbaiki situasi keuangannya dalam jangka pendek dibandingkan dengan daerah dengan tekanan keuangan yang lebih tinggi. Keadaan *fiscal stress* yang dipengaruhi oleh anggaran pendapatan daerah yang terbatas dapat berdampak cukup besar kepada pelaksanaan & penyediaan barang publik. Gorina & Craig (2016) menunjukkan jikalau pemda tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan fiskal saat memberikan pelayanan publik maka dapat mengakibatkan *fiscal stress*. Arnett B. S (2012) menjelaskan *fiscal stress* sebagai salah satu yang dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran pendapatan daerah sehingga dapat berdampak signifikan terhadap pelaksanaan & tersedianya barang publik. Gorina & Craig (2016) mengemukakan jikalau *fiscal stress* muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan pemda dalam mencukupi kebutuhan keuangan dalam guna menyediakan pelayanan publik. Penerimaan fiskal daerah

harus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang dapat memicu tekanan fiskal yang lebih besar.

Pembiayaan pemerintah didasarkan pada prinsip desentralisasi dengan mengorbankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada konteks pengelolaan masyarakat dan pemberian layanan menurut prinsip desentralisasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pajak dan pengelolaan sumber keuangan. Sumber keuangan suatu wilayah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah. Melalui APBD pemerintah daerah mengelola langsung tiga sumber pertama, sedangkan pemerintah pusat mengelola sumber lainnya dan bekerjasama dengan pemerintah daerah (Halim, 2009: 35).

Pendapatan daerah yakni suatu nilai tambah dari nilai bersih yang merupakan hak pemda (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah) diantaranya yakni Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Tabel 1 memperlihatkan bahwa 17,23% dari target PAD sebesar Rp39.92 triliun tercapai pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2021, PAD mencapai Rp1,17 triliun atau 13,94% dari target yang sudah ditetapkan dan realisasi pendapatann transfer 19,13% dari target Rp29,8 triliun berasal dari Dana Perimbangan Rp5,54 triliun, DID dan Dana Penyesuaian Rp80,86 miliar, serta Transfer Pemerintah Provinsi Rp76,9 miliar, Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi tahun 2021 sebesar Rp2,22 miliar.

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan APBD tahun 2019-2021 sebesar Rp6,87 triliun, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2021. Penurunan dari semua komponen pendapatan daerah terjadi akibat pandemi Covid-19. Pemulihan pendapatan tahun 2021 berasal dari pendapatan transfer dengan peningkatan realisasi Rp0,82 triliun dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp5,70 triliun, lain halnya dengan tahun 2020 di mana PAD juga akan meningkat signifikan pada tahun 2021 yakni mencapai Rp1,17 triliun.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021
PAD	1.072	936	1.172,50
Pajak Daerah	720	564	898,61
Retribusi Daerah	23	28	25,02
Hasil. Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100	117	123,07
Lain-Lain PAD yang Sah	229	226	125,80
Pendapatan Transfer	7.534	4.878	5.702,62
Transfer Pusat Dana Perimbangan	6.601	4,756	5.544,86
DID dan Dana Penyesuaian	260	0	80,86
Transfer Pemprov	673	122	76,90
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	263	52	2,22
Hibah	1	42	2,22
Dana Darurat	-		
Bantuan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Lainnya	262	9	0,00
Total Pendapatan	8.869	5.865	6.877,34

Sumber : Pemda Lingkup Prov. Sumsel (2021, diolah)

Belanja daerah mencakup Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Ke Daerah/Bagii Hasil. Tabel 2 menunjukkan belanja daerah yang terealisasi hingga tahun 2021 sebesar 3,12 triliun rupiah. Belanja pegawai dan belanja barang sebagai jenis belanja yang lebih tinggi yaitu Rp12,71 triliun & Rp10,47 triliun yang masing-masing mencapai Rp2,05 triliun (16,14%) & Rp473 miliar (4,52%). Mencapai pembayaran bansos minimal 0%, ditujukan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Dibandingkan tahun 2020 dan 2019, pada tahun 2021 telah tercapai belanja modal infrastruktur sebesar Rp378 miliar (4,35%) seperti belanja produktif. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya *multiplier effect* dalam jangka panjang terhadap perekonomian khususnya pada saat kondisi Covid-19 terjadi akibat dari realisasi belanja modal.

Tabel 2 Realisasi Belanja APBD Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)

APBD Klasifikasi Ekonomi	2019	2020	2021
Belanja Operasional	2.965	3.199	2.625,76
Belanja Pegawai	1.971	2.072	2.053,02
Belanja Barang dan Jasa	859	879	473,85
Belanja Bunga	6	8	15,13
Belanja Subsidi	9	2	0,00
Belanja Hibah	79	193	30,86
Belanja Bantuan Sosial	1	37	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	40	8	52,89
Belanja Modal	202	105	378,29
Belanja Tanah	2	1	1,53
Belanja Peralatan & Mesin	61	42	13,57
Belanja Gedung & Bangunan	18	9	36,75
Belanja Jalan & Jaringan	120	52	325,94
Belanja Aset Tetap Lainnya	1	0	0,50
Belanja Aset Lainnya	0	0	0
Belanja Tak Terduga	1	9	0,17
Transfer/ Bagi Hasil Bantuan/ Kota/Desa	1.272	253	117,18
Total	4.440	3.565	3.121,40

Sumber : Pemda Lingkup Prov. Sumsel (2021, diolah)

Tabel 2 menunjukkan total belanja APBD yang terealisasi hingga periode 2021 sebesar Rp3,12 triliun mengalami penurunan sebesar 3% dan 0,52% dibandingkan dengan periode 2019 hingga 2020. Penurunan tersebut terjadi karena belanja transfer hanya terealisasi sebesar 1,9 persen dari Rp 6,17 triliun dibandingkan dengan masing-masing 5 persen dan 21 persen pada periode sebelumnya. Selain itu, tingkat realisasi beban usaha turun dari Rp26,53 triliun menjadi 9,90%. Namun, belanja modal juga meningkat menjadi Rp378 miliar pada 2021 di mana peningkatan ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan *multiplier effect* jangka panjang terhadap perekonomian dari realisasi belanja modal terutama di masa pandemi Covid-19 yang tentunya perlu untuk dievaluasi dan didukung.

Belanja daerah juga memiliki struktur yang harus diperhitungkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraannya. Seiring

tumbuhnya kepercayaan di masyarakat maka akan meningkatkan porsi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya yakni membayar pajak dan tentunya merupakan bagian dari PAD. Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, peneliti membahas terkait “Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diajukan pada penelitian ini yakni bagaimana pengaruh transfer pemerintah pusat dan *fiscal stress* terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni menganalisa dampak dari transfer pemerintah pusat dan *fiscal stress* terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya :

Manfaat Akademis

1. Berkontribusi melalui penelitian akademis dengan fokus pada ekonomi dan perekonomian daerah.
2. Memperkaya penelitian secara teoritis dan selanjutnya melakukan penelitian mengenai transfer pemerintah dan belanja daerah.

Manfaat Praktis :

1. Menyediakan informasi yang bermanfaat kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan mengenai Transfer Pemerintah Pusat dan *Fiscal Stress* pada Belanja Daerah di lingkup Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
2. Menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, M., Muthia Basri, Y., & Indrawati, N. (2017). Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 25(2), 45–60. <https://doi.org/10.31258/je.25.2.p45>
- Al-Khawarizmi, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAPER) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Jawa Timur. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 107–112. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3394>
- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JMMA: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 242–262. <https://doi.org/10.2746/JMMA.v2i2.262>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2023). <https://sumsel.bps.go.id/>
- Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(1), 44–52. <https://doi.org/journal.feb.unmul.ac.id/index.php/inovasi>
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi*, 2(3), 166–178. <https://doi.org/10.52300/jmsso.v2i3.3632>
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2006 – 2021. *Jurnal Economina*, 2(1), 1210–1221. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.269>
- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 1–20. <https://doi.org/10.35794/jpekd.10248.17.2.2015>
- Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 5(3), 171–181. <https://doi.org/itrev.kemenkeu.go.id>
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27(2),

630–643. <https://doi.org/10.33592/jeb.v27i2.1815>

Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (Ketiga). Yogyakarta: BPFE.

Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>

Novianti, F., Riani, W., & Mafruhah, A. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Jawa Barat Periode 2011-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 273–281. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3235>

Nur, M., Mus, A. R., Mapparenta, & Nurwanah, A. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *MSEJ: Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 4173–4181. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1317>

Ode Abdul, L. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 25–41. <https://doi.org/ejurnal.stie-portnumbay.ac.id>

Orisu, L. M., Yap, R. A., & Salle, H. T. (2021). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat dan Fiskal Stress Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 6(1), 15–31. <https://doi.org/10.52062/keuda.v6i1.1665>

Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal. *Inovasi*, 17(4), 653–660. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041>

Prestika, W., & Susetyo, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 55–63. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i1.443>

Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1412–1425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.765>

Q, M. U., Haryadi, & Gowon, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(3), 189–198. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.12908>

Septianayu Dwi, B., & Budi Riharjo, I. (2018). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–16.

Seswandi, A., Arini, & Novianti, S. (2021). Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2), 237–244. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v7i2.687>

- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)* (Kedua). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Sisilia, M., & Harsono. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6182>
- Sofiyani, L., & Subadriyah. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/ejournal.unisnu.ac.id/jra/>
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.1382>
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPEF-UI bima Grafika.
- Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA: Jurnal Of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30–37. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Trianto, L., & Panggabean, M. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. *Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 21–33. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v5i1.72>
- Vanomy, A. E. (2019). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Melalui Belanja Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *JAD: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(1), 62–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v2i1.445>
- Viara, R., & Pujiati, L. (2019). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/42>
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>
- Yasir, M., & Saleh, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (BD) dan Fenomena Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 378–404. <https://doi.org/10.35794/jpekd.10248.17.2.2015>